

Kolaborasi Akademisi Dan Pemerintah Daerah Dalam Evaluasi Rkpd Kabupaten Nunukan Untuk Penguatan Tata Kelola Dan Kinerja Pembangunan Daerah

Sulmiah^{1*}, Asri Nur Aina², Novayanti Sophia Rukmana³, Febrianto Syam⁴, Herlina Sakawati⁵

¹Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia, email: sulmiah@unm.ac.id

²Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia, email: asrinuraina@unm.ac.id

⁴Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia, email: novayanti@unm.ac.id

⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia, email: febrianto.syam@uin-alauddin.ac.id

⁵ Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia, email: herlinasukawati@unm.ac.id

*sulmiah@unm.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 2025-09-20

Diterima: 2025-09-28

Diterbitkan: 2025-11-20

Keywords:

Regional Development
Evaluation; Academic
Collaboration; Governance;
RKPD

Kata Kunci:

Evaluasi Pembangunan
Daerah; Kolaborasi
Akademisi; Tata Kelola
Pemerintahan; RKPD



Abstract

This community service activity was conducted to strengthen regional governance and development performance through collaboration between academics and the Government of Nunukan Regency. The activity was motivated by the limited evaluation system of the Regional Government Work Plan (RKPD), which remains administrative and not yet performance-based. The main objective was to enhance the capacity of local officials in developing and applying measurable evaluation instruments and to produce an accountable and data-driven RKPD evaluation document. The method applied was Participatory Action Research (PAR) combined with the Collaborative Governance approach, involving document analysis, focus group discussions (FGD), workshops on evaluation instrument design, and technical assistance. The results indicated significant improvements in officials' ability to analyze performance, identify inhibiting and supporting factors, and develop evidence-based policy recommendations. The final output, the RKPD Evaluation Document of Nunukan Regency, demonstrates the effectiveness of collaboration between academia and government in promoting transparent, participatory, and result-oriented local governance.

Abstrak



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2025 Sulmiah, Asri Nur
Aina, Novayanti Sopia Rukmana,
Febriyanto Syam, Herlina Sakawati

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkuat tata kelola dan kinerja pembangunan daerah melalui kolaborasi antara akademisi dan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Latar belakang kegiatan ini didasari oleh masih lemahnya sistem evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang cenderung berorientasi administratif dan belum sepenuhnya berbasis kinerja. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam menyusun dan menerapkan instrumen evaluasi yang terukur, serta menghasilkan dokumen evaluasi RKPD yang akuntabel dan berbasis data. Metode yang digunakan adalah pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan prinsip Collaborative Governance, melalui tahapan analisis dokumen, forum diskusi kelompok (FGD), workshop penyusunan instrumen evaluasi, dan pendampingan teknis. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan aparatur dalam melakukan analisis kinerja, memahami faktor penghambat dan pendukung capaian pembangunan, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Produk akhir berupa dokumen evaluasi RKPD Kabupaten Nunukan menjadi bukti nyata kolaborasi akademisi dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Untuk memastikan arah dan efektivitas pembangunan, pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen *Rencana Kerja Pemerintah Daerah* (RKPD) sebagai rencana tahunan yang menjabarkan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RKPD tidak hanya menjadi dasar penyusunan APBD, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (Isnain et al., 2025; Muktiali, 2009).

Namun demikian, pelaksanaan dan evaluasi RKPD kerap menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah dengan tantangan geografis dan sosial seperti Kabupaten Nunukan. Permasalahan utama meliputi keterbatasan kapasitas aparatur, belum optimalnya sistem pengelolaan data pembangunan, serta lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi lintas organisasi perangkat daerah (Taufik, 2013; Yulius & Timba, 2025). Akibatnya, proses evaluasi pembangunan sering kali tidak menghasilkan umpan balik yang memadai bagi siklus perencanaan tahun berikutnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola pembangunan melalui pendekatan yang lebih kolaboratif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Nunukan, yang dilakukan secara kolaboratif antara akademisi dan pemerintah daerah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkuat sistem evaluasi pembangunan yang akuntabel dan berbasis data, serta menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki efektivitas program dan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Dengan kata lain, kegiatan ini

menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola dan kinerja pembangunan melalui sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Peran akademisi dalam konteks ini bukan sekadar sebagai pengamat, melainkan sebagai mitra strategis (*knowledge partner*) yang memberikan kontribusi dalam bentuk analisis objektif, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah (Jamasy et al., 2025; Siswanti et al., 2025). Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *collaborative governance* yang menekankan partisipasi lintas sektor dan aktor dalam proses pengambilan keputusan publik (Ansell & Gash, 2008; Muzakir et al., 2025). Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat terbentuk tata kelola pembangunan daerah yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Nunukan secara sistematis dan berbasis data.
2. Memperkuat kapasitas aparatur dalam menyusun dan menggunakan instrumen evaluasi kinerja pembangunan.
3. Mendorong pengembangan model kolaborasi berkelanjutan antara akademisi dan pemerintah dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Sebagai output utama, kegiatan ini menghasilkan dokumen evaluasi RKPD Kabupaten Nunukan yang memuat analisis capaian kinerja pembangunan, identifikasi masalah strategis, serta rekomendasi kebijakan untuk peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan. Dokumen ini tidak hanya menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan, tetapi juga menjadi model implementasi sinergi akademisi-pemerintah dalam upaya penguatan tata kelola dan kinerja pembangunan daerah secara umum.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang menekankan keterlibatan aktif antara akademisi dan pemerintah daerah dalam setiap tahap kegiatan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan proses pembelajaran bersama (*mutual learning process*) sekaligus menghasilkan solusi nyata dalam penguatan tata kelola evaluasi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) yang dikombinasikan dengan prinsip *Collaborative Governance Approach*. Melalui metode ini, akademisi dan perangkat daerah terlibat bersama dalam identifikasi masalah, penyusunan solusi, pelaksanaan kegiatan, hingga refleksi hasil. Pendekatan ini mendorong terwujudnya sistem evaluasi pembangunan yang lebih transparan, terukur, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan analisis dokumen RKPD dan laporan kinerja pembangunan daerah untuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan kebutuhan evaluasi. Hasil analisis menjadi dasar dalam pelaksanaan

Forum Group Discussion (FGD) bersama Bappeda dan perangkat daerah guna menyepakati indikator kinerja utama dan area perbaikan. Tahapan berikutnya adalah workshop penyusunan instrumen evaluasi RKPD, di mana peserta difasilitasi untuk merumuskan format evaluasi yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan daerah.

Selanjutnya dilakukan pendampingan teknis untuk mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan perbaikan tata kelola. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Nunukan pada periode Januari hingga Maret 2025, dengan output utama berupa dokumen evaluasi RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebagai hasil kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara akademisi dan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menghasilkan sejumlah capaian yang signifikan dalam upaya memperkuat tata kelola dan kinerja pembangunan daerah. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama Bappeda dan perangkat daerah terkait, yang secara aktif berpartisipasi dalam setiap tahap pelaksanaan. Akademisi berperan sebagai fasilitator dan mitra pengetahuan, sedangkan pemerintah daerah menjadi pelaksana utama sekaligus penerima manfaat dari proses peningkatan kapasitas kelembagaan.

Tahapan awal kegiatan diawali dengan analisis dokumen RKPD dan laporan kinerja pembangunan daerah, yang bertujuan mengidentifikasi capaian program, kesenjangan pelaksanaan, serta efektivitas kebijakan pembangunan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi pembangunan sebelumnya masih berfokus pada aspek administratif dan belum secara optimal menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penilaian. Evaluasi lebih menitikberatkan pada realisasi fisik dan keuangan tanpa diimbangi analisis mendalam terhadap dampak dan manfaat program. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi yang lebih sistematis dan berbasis data sektoral untuk mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan akuntabel.



Gambar 1. Kegiatan analisis dokumen RKPD dan laporan kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan secara kolaboratif antara tim akademisi dan Bappeda Kabupaten Nunukan.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang berfungsi sebagai wadah kolaboratif antara akademisi, Bappeda, dan perangkat daerah untuk mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan evaluasi. FGD ini menghasilkan pemahaman bersama bahwa keberhasilan evaluasi tidak hanya ditentukan oleh instrumen yang digunakan, tetapi juga oleh konsistensi dan kualitas data, serta komitmen setiap perangkat daerah dalam menjaga akurasi informasi pembangunan. Selain itu, kegiatan ini memperlihatkan peningkatan kesadaran peserta akan pentingnya peran akademisi sebagai mitra strategis dalam mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*).



Gambar 2. Suasana Forum Group Discussion (FGD) antara akademisi dan perangkat daerah dalam merumuskan permasalahan serta langkah perbaikan untuk evaluasi RKPD

Kegiatan kemudian berlanjut ke workshop penyusunan instrumen evaluasi RKPD, yang difokuskan pada peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam melakukan penilaian kinerja pembangunan secara komprehensif. Dalam kegiatan ini, peserta difasilitasi untuk menyusun matriks indikator kinerja berdasarkan dimensi *input*, *output*, *outcome*, dan *impact* pembangunan. Penyusunan instrumen dilakukan dengan mengacu pada *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017* serta prinsip *Result-Based Management*, sehingga menghasilkan format evaluasi yang terukur dan mudah diterapkan oleh perangkat daerah.

Instrumen evaluasi yang dikembangkan tidak hanya menilai capaian program berdasarkan indikator kinerja, tetapi juga membandingkan antara realisasi kegiatan dan target kinerja serta anggaran yang telah ditetapkan. Dari hasil perbandingan tersebut, peserta dilatih untuk mengidentifikasi faktor penghambat ketika capaian tidak sesuai dengan target, serta faktor pendukung yang berkontribusi terhadap keberhasilan ketika realisasi melampaui target. Dengan pendekatan ini, evaluasi RKPD menjadi lebih objektif dan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kemampuan analitis aparatur dalam menafsirkan hasil evaluasi secara kritis dan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap pentingnya konsistensi data dalam mendukung proses evaluasi yang kredibel. Hasil workshop ini menjadi dasar penting bagi pengembangan sistem evaluasi berkelanjutan yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya.



Gambar 3. Fasilitator dari tim akademisi memberikan arahan teknis dalam penyusunan instrumen evaluasi kepada peserta workshop

Tahap akhir berupa pendampingan teknis penerapan instrumen evaluasi menjadi bagian penting dari proses pembelajaran kolaboratif. Akademisi mendampingi tim Bappeda dalam menerapkan instrumen yang telah disusun untuk menilai capaian kinerja beberapa program prioritas daerah. Pendampingan ini menggunakan metode *coaching clinic*, di mana tim akademisi dan aparatur daerah secara langsung menganalisis data capaian, meninjau kesenjangan, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis hasil evaluasi. Melalui kegiatan ini, aparatur daerah memperoleh peningkatan kompetensi dalam analisis kinerja dan penyusunan laporan evaluasi tahunan yang lebih sistematis.



Gambar 4. Proses pendampingan akademisi kepada tim teknis pemerintah daerah dalam mengolah data dan menyusun laporan evaluasi RKPD

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan, dihasilkan dokumen evaluasi RKPD Kabupaten Nunukan sebagai produk utama kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah. Dokumen ini memuat hasil penilaian capaian pembangunan, analisis permasalahan strategis, serta rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya. Keberadaan dokumen ini menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi antara dunia akademik dan birokrasi dapat menghasilkan keluaran yang aplikatif serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Dari sisi akademik, kegiatan ini mencerminkan implementasi nyata konsep *collaborative governance*, di mana kerja sama lintas sektor antara aktor publik dan non-publik mampu menciptakan nilai tambah dalam tata kelola pemerintahan (La Ode Syaiful Islamy, 2018; Sahputri, 2023). Melalui mekanisme kolaborasi ini, proses evaluasi pembangunan daerah tidak lagi bersifat top-down, melainkan menjadi ruang partisipatif untuk membangun kapasitas bersama dan berbagi pengetahuan. Dampak nyata dari kegiatan ini terlihat melalui meningkatnya profesionalisme aparatur, perbaikan dalam sistem pengelolaan data, serta tumbuhnya budaya kerja yang lebih akuntabel dan berbasis kinerja.

Kolaborasi ini menunjukkan bahwa kemitraan antara akademisi dan pemerintah daerah dapat menjadi model efektif dalam mendorong praktik tata kelola pembangunan yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menjaga kesinambungan kemitraan ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan diharapkan mampu memperkuat sistem evaluasi pembangunan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi RKPD secara kolaboratif dan berbasis kinerja. Melalui analisis dokumen, FGD, workshop, dan pendampingan teknis, aparatur daerah memperoleh peningkatan kemampuan dalam merancang serta menerapkan instrumen evaluasi yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa dokumen evaluasi RKPD Kabupaten Nunukan yang memuat capaian kinerja, analisis permasalahan, dan rekomendasi kebijakan bagi perbaikan perencanaan. Kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah terbukti mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sekaligus memperkuat kemitraan berkelanjutan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis bukti.

DAFTAR RUJUKAN

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Isnan, W., Muin, N., Iriani, I., Humaedi, M. A., Diniyati, D., Listyawati, A., & Aminudin, A. (2025). Bridging gaps in rural resilience: smallholder farmers' perceptions of formal and community-based social assistance in Indonesia. *Agricultural and Food Economics*, 13(1), 1–19.
- Jamasy, O., Pranoto, Y., & Yasin, A. P. (2025). *Konsep Dan Model Pendampingan Berkelanjutan Untuk Organisasi Berbasis Masyarakat*. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Muktiali, M. (2009). Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Manfaat Program Pembangunan di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 3(2), 11–20.
- Muzakir, M. A. I., Widiyanto, A., Mulyadi, E., Yudawisastra, H. G., & Hermanu, A. I. (2025). Reconstruct regional government's role in policy harmonization for improving the quality of national education. *International Journal of Educational Management*, 1–17.
- Sahputri, R. A. M. (2023). *Public Value Management: Model Tata Kelola Pelayanan Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Siswanti, I., Nawangsari, L. C., & Pratama, A. (2025). Strategy for Diversifying Revenue for The Sustainability of Msmes Pertubuhan Masyarakat Indonesia (Permai) in Penang, Malaysia. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 6(2), 68–84.
- Taufik, T. (2013). Peran monitoring dan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 1(2), 199–212.
- Yulius, K. G., & Timba, Y. D. (2025). From Coast to Highlands: A Cross-Regional SWOT/SOAR Analysis of 14 Indonesian Tourism Villages. *TRJ Tourism Research Journal*, 9(2), 133. <https://doi.org/10.30647/trj.v9i2.281>